



Peran Dinas Sosial Kota Batam dalam Penyaluran Bantuan Sosial untuk Mendukung Ketertiban Sosial di Masyarakat

Brigitta Sylvia^{1*}, Mitta Viska Maharani², Renti Oktavianti³, Nixcon Monteqin Sinaga⁴, Wildan Darsono⁵

^{1,2,3} Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Fakultas Perlindungan Masyarakat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 16, 2025

Revised August 12, 2025

Accepted August 13, 2025

Available online August 13, 2025

Kata Kunci:

Bantuan Sosial, Ketertiban Sosial, Masyarakat

Keywords:

Social Assistance, Social Order, Society.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Brigitta Sylvia, Mitta Viska Maharani, Renti Oktavianti, Nixcon Monteqin Sinaga, Wildan Darsono.
Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam berperan strategis dalam menjaga ketertiban sosial di tengah kompleksitas dinamika sosial ekonomi kota. Program bantuan, seperti Bansos Lansia dan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat rentan, tetapi juga menjadi sarana preventif dalam mencegah konflik sosial dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi langsung dan studi dokumentasi, yang menemukan bahwa meskipun program mengalami tantangan pada aspek validitas data dan kelengkapan administrasi, integrasinya dengan visi pembangunan daerah memperkuat efektivitasnya. Rekomendasi yang diajukan mencakup pengembangan sistem verifikasi data digital, edukasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring program untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga menjadi instrumen penguatan stabilitas sosial di Kota Batam.

ABSTRACT

The distribution of social assistance by the Department of Social Affairs and Community Empowerment of Batam City plays a strategic role in maintaining social order amidst the city's complex socio-economic dynamics. Programs such as Elderly Social Assistance and the Extreme Poverty Eradication Acceleration Program not only address basic needs of vulnerable communities but also serve as preventive tools to avert social conflict and enhance public trust in the government. This study employs a descriptive qualitative method through direct observation and document analysis. The findings reveal challenges related to data validity and administrative completeness; however, the program's alignment with the city's development vision reinforces its effectiveness. Recommendations include developing digital data verification systems, conducting public education, and utilizing information technology for real-time monitoring to improve accuracy and accountability. Hence, social assistance becomes not only charitable but also a tool for reinforcing social stability in Batam City.

1. PENDAHULUAN

Sebagai kota metropolitan sekaligus kawasan industri terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus tujuan migrasi penduduk dari berbagai daerah di Indonesia. Pertumbuhan ini mendorong percepatan urbanisasi, namun juga memunculkan berbagai masalah sosial seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan ekstrem. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan sosial di wilayah perkotaan memiliki korelasi kuat dengan peningkatan kriminalitas dan ketidakstabilan sosial (Dewantoro, 2024). Studi lain juga menunjukkan bahwa tingginya angka pengangguran di wilayah industri seringkali menjadi pemicu munculnya aktivitas ekonomi informal ilegal seperti gelandangan, pengemis, hingga tindak kriminal (Chantiqa et al., 2024).

*Corresponding author

E-mail addresses: brigsyl2307@gmail.com (Brigitta Sylvia)

Fenomena serupa juga ditemukan di Batam, di mana keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti gelandangan, pengemis, dan orang terlantar semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keresahan publik apabila tidak segera ditangani melalui kebijakan sosial yang tepat sasaran.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial (bansos) tidak hanya berfungsi sebagai upaya karitatif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial untuk mencegah konflik horizontal (Nurhanifa & Ansori, 2024). Bantuan sosial yang tepat sasaran terbukti mampu menurunkan tingkat kriminalitas perkotaan melalui pengurangan beban ekonomi rumah tangga miskin (Supit & Lumingkewas, 2023). Namun demikian, implementasi bansos sering menghadapi tantangan seperti ketidakakuratan data penerima, kurangnya transparansi distribusi, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan (Ali et al., 2022).

Di Kota Batam, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) memiliki tanggung jawab strategis dalam menangani permasalahan ini. Peran strategis tersebut mencakup pendataan, verifikasi, penyaluran, dan pengawasan bantuan sosial yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Pelaksanaan bantuan sosial di Kota Batam berlandaskan pada sejumlah regulasi daerah, di antaranya Peraturan Wali Kota Batam Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial; Peraturan Wali Kota Batam Nomor 127 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial; Peraturan Wali Kota Batam Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinsos PM; serta Peraturan Wali Kota Batam Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penanganan Orang Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis. Regulasi ini menegaskan bahwa bantuan sosial bukan sekadar bantuan ekonomi, melainkan juga upaya preventif untuk menjaga ketertiban sosial.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Dinsos PM Kota Batam dalam penyaluran bantuan sosial serta kontribusinya terhadap terciptanya ketertiban sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis berbasis data untuk meningkatkan efektivitas tata kelola bantuan sosial, sehingga perannya sebagai instrumen pengendalian sosial di perkotaan dapat optimal.

Kota Batam, sebagai kota metropolitan dan pusat industri di Kepulauan Riau, mengalami ledakan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pada saat yang sama, kesenjangan sosial dan kemiskinan ekstrem semakin nyata. Data mengungkap bahwa daerah perkotaan dengan ketimpangan ekonomi tinggi serta pengangguran yang berkelanjutan cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi (Yusuf & Zanudin, 2025). Hal ini konsisten dengan teori Durkheim dan Merton (Santoso & Zulfa, 2022), yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara harapan individu dan sarana yang tersedia dapat memicu perilaku menyimpang.

Berbagai studi mengungkap bahwa bansos berperan lebih dari sekadar bantuan ekonomi bantuan yang tepat sasaran juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang efektif (Ali et al., 2022; Nurhanifa & Ansori, 2024). Khususnya di daerah perkotaan, mekanisme bansos seperti PKH dan BPNT mampu mendukung stabilitas sosial dengan membantu memenuhi kebutuhan keluarga miskin (Anwar et al., 2024). Namun, keberhasilan intervensi ini sangat tergantung pada kualitas data penerima, transparansi pelaksanaan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan (Anwar et al., 2024; Supit & Lumingkewas, 2023).

Dinas Sosial memiliki tugas strategis dalam menjalankan program bansos, mulai dari pendataan hingga pengawasan. Di Batam, pelaksanaannya didasarkan pada Perwal Kota Batam No. 40/2018, No. 127/2023, No. 42/2023, dan No. 60/2024, yang menegaskan aspek akuntabilitas dan akurasi dalam administrasi bansos. Studi daerah lain, seperti Deli Serdang dan DIY, menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan sangat ditentukan oleh koordinasi, validasi data, dan peserta pengawasan yang baik (Anwar et al., 2024; Tanggu Holo & Supardal, 2023).

Hingga kini, belum banyak studi yang secara empiris meninjau peran bansos dalam konteks urbanisasi dan ketertiban sosial di Batam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alur mekanisme penyaluran bansos di Batam (verifikasi–pengawasan), mengidentifikasi hambatan administratif dan substantif dalam pelaksanaannya, menganalisis kontribusi bansos terhadap upaya pengendalian ketidaktertiban sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Batam dalam penyaluran bantuan sosial serta kontribusinya terhadap terciptanya ketertiban sosial. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menginterpretasikan fenomena sosial dalam konteks alamiah melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian (Creswell, 2018; Moleong, 2019).

Penelitian dilakukan di Kantor Dinsos PM Kota Batam sebagai institusi yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan bantuan sosial. Data utama diperoleh melalui observasi partisipatif yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, laporan pelaksanaan program bansos, peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur akademik dan penelitian terdahulu yang relevan (Anwar et al., 2024; Supit & Lumingkewas, 2023).

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode, yaitu:

1. Observasi langsung, untuk mengamati proses pendataan, verifikasi, penyaluran, dan evaluasi program bansos.
2. Studi dokumentasi, melalui telaah dokumen regulasi daerah, laporan program bantuan sosial, serta arsip administrasi Dinsos PM.
3. Studi kepustakaan, untuk memperkuat analisis teoretis dengan merujuk pada hasil penelitian terdahulu dan literatur akademik.

Data dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh (Miles et al., 2020). Analisis dilakukan dengan cara menelaah kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, serta mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan bantuan sosial berkontribusi dalam meredam potensi gangguan ketertiban sosial seperti kemiskinan ekstrem, pengangguran, dan keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Pendekatan ini dipilih untuk menghasilkan gambaran komprehensif mengenai efektivitas bansos sebagai instrumen preventif dan kuratif dalam mendukung stabilitas sosial di Kota Batam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat uraian hasil penelitian beserta pembahasan secara ilmiah dan mendalam. Temuan yang disampaikan bukan sekadar data mentah, tetapi merupakan hasil olahan data yang telah dianalisis secara sistematis. Penjelasan terhadap temuan penelitian harus disusun secara logis dan berbasis kajian ilmiah, mencakup apa yang ditemukan, alasan terjadinya temuan tersebut, serta penjelasan terhadap tren atau pola yang muncul berdasarkan pendekatan ilmiah.

Peran dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial Kota Batam

Verifikasi Lapangan Penerima Bantuan

Tahap awal penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Batam adalah verifikasi lapangan terhadap rumah tangga miskin yang telah

terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian data administratif dengan kondisi riil di lapangan serta mencegah terjadinya duplikasi penerima. Proses verifikasi yang berbasis data aktual dinilai sebagai salah satu faktor penting untuk menjamin ketepatan sasaran program.

Penyusunan Daftar Penerima Bantuan Sosial

Setelah proses verifikasi, Dinsos PM menyusun daftar penerima bansos menggunakan sistem *by name by address*. Penyusunan ini dilakukan dengan ketelitian tinggi agar setiap penerima yang masuk dalam daftar benar-benar memenuhi kriteria penerima bantuan sesuai regulasi. DTKS menjadi acuan utama dalam penyusunan daftar ini sebagaimana praktik di daerah lain yang menekankan pentingnya basis data nasional sebagai instrumen validasi penerima bantuan.

Distribusi Bantuan Sosial Lansia

Penyaluran bansos dilakukan setelah daftar penerima final disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas. Program Bansos Lansia di Kota Batam, misalnya, mendistribusikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan kepada 2.000 penerima selama sembilan bulan. Pelaksanaan distribusi di lapangan diawasi secara ketat untuk memastikan bantuan diterima langsung oleh penerima yang berhak. Mekanisme distribusi langsung ini sesuai dengan prinsip *accountability* dalam pengelolaan keuangan negara.

Pelaporan dan Evaluasi Program

Setiap tahapan pelaksanaan program bansos wajib didokumentasikan dalam bentuk laporan berkala. Laporan tersebut mencakup perkembangan verifikasi, penyusunan daftar penerima, hingga hasil distribusi. Evaluasi dilakukan secara internal melalui forum rapat Dinsos PM untuk mengidentifikasi kendala administratif, teknis, dan sosial. Evaluasi berkala penting dilakukan agar efektivitas program tetap terjaga dan dapat disesuaikan dengan dinamika sosial di masyarakat.

Koordinasi Antar-Instansi

Koordinasi intensif antarinstansi menjadi salah satu kunci keberhasilan penyaluran bansos. Dalam konteks Bansos Lansia di Kota Batam, koordinasi melibatkan penyusunan SK Kepala Dinas, pengadaan materai, pembukaan rekening di Bank Rakyat Kota Batam (BRK), serta pengaturan alokasi anggaran. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menegaskan bahwa sinergi lintas instansi sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan sosial.

Kontribusi Penyaluran Bantuan Sosial terhadap Ketertiban Masyarakat

Penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Batam memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan ketertiban sosial. Bansos tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat miskin, tetapi juga sebagai strategi pengendalian sosial yang bersifat preventif dan kuratif. Berikut beberapa kontribusi penting program bansos terhadap ketertiban sosial:

Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pengurangan Tekanan Ekonomi

Bansos berperan penting dalam membantu masyarakat rentan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama melalui distribusi bantuan sembako dan uang tunai. Pemenuhan kebutuhan dasar ini secara langsung mengurangi tekanan ekonomi yang berpotensi memicu

tindak kriminal dan keresahan sosial. Penelitian Anwar, Mudan, dan Batubara, menunjukkan bahwa bantuan sosial yang tepat sasaran dapat menekan angka pelanggaran hukum karena mengurangi motif ekonomi dalam kejahatan.

Pencegahan Konflik Sosial melalui Distribusi yang Adil

Penyaluran bansos yang dilakukan secara selektif, adil, dan transparan dapat meminimalkan kecemburuan sosial antarwarga. Hal ini sejalan dengan temuan Supit dan Lumingkewas, yang menegaskan bahwa keadilan dalam distribusi bantuan menjadi faktor penting dalam mencegah konflik horizontal di masyarakat.

Peningkatan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

Kehadiran bansos yang dikelola secara profesional meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Kepedulian pemerintah melalui bantuan langsung memperkuat hubungan sosial antara negara dan warganya. Nurhanifa dan Ansori menyatakan bahwa keberhasilan distribusi bantuan yang transparan dan tepat sasaran berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan publik.

Penguatan Solidaritas Sosial dan Gotong Royong

Program bansos juga berfungsi sebagai katalisator terbentuknya solidaritas sosial. Nilai gotong royong dan kepedulian antarwarga semakin tumbuh karena masyarakat terdorong untuk ikut mendukung penerima bantuan. Fenomena ini relevan dengan pandangan Yusuf dan Zanudin, yang menekankan bahwa solidaritas sosial menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial di perkotaan.

Pendekatan Preventif terhadap Gangguan Ketertiban

Bansos berfungsi sebagai strategi pencegahan dini (*preventive approach*) terhadap potensi gangguan ketertiban sosial. Dengan mengatasi akar permasalahan sosial—seperti kemiskinan ekstrem dan pengangguran—pemerintah tidak hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga membangun ketertiban secara berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Bansos dalam Menjaga Ketertiban Sosial

Efektivitas bantuan sosial (bansos) dalam menjaga ketertiban sosial sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks Kota Batam, terdapat faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan program sekaligus tantangan yang menjadi hambatan implementasi.

Faktor Penghambat

1. Validitas dan Akurasi Data Penerima Bantuan
Ketepatan data menjadi kendala utama dalam pelaksanaan bansos. Kesalahan data atau duplikasi penerima dapat menimbulkan ketidakadilan distribusi dan kecemburuan sosial. Oleh karena itu, proses verifikasi lapangan yang cermat menjadi krusial untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ali, Prasetyo, dan Ramadhan, yang menegaskan bahwa kelemahan dalam pendataan merupakan penyebab utama ketidaktepatan sasaran bansos di berbagai daerah.
2. Tantangan Administrasi dan Pengelolaan Anggaran

Bansos Lansia di Kota Batam dialokasikan sebesar Rp600 juta, sehingga pencairan dan pengelolaan dana harus mengikuti prosedur administrasi yang ketat. Proses administrasi yang lambat dapat menghambat distribusi bantuan secara tepat waktu. Supit dan Lumingkewas juga mengungkapkan bahwa keterlambatan pencairan anggaran seringkali berdampak pada ketidakpuasan masyarakat terhadap program bansos.

3. Koordinasi Antar-Instansi yang Masih Terbatas

Efektivitas bansos bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, Dinsos PM, dan masyarakat. Koordinasi yang kurang optimal berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, distribusi, dan evaluasi. Tangguh Holo dan Supardal menekankan bahwa lemahnya koordinasi lintas instansi merupakan salah satu penghambat utama dalam implementasi bansos di tingkat daerah.

Faktor Pendukung

1. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah
Program Bansos Lansia terintegrasi dengan prioritas pembangunan sosial Pemerintah Kota Batam. Wali Kota Batam telah mencanangkan peningkatan kesejahteraan lansia sebagai salah satu prioritas pembangunan sosial pada 2025. Dukungan kebijakan yang kuat memperkuat keberlanjutan program dan alokasi anggaran yang memadai.
2. Integrasi dengan Program Pembangunan Sosial Lainnya
Program bansos di Kota Batam diintegrasikan dengan kebijakan sosial lainnya, sehingga menciptakan sinergi dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan kesejahteraan lansia. Pendekatan ini selaras dengan konsep *integrated social policy* yang diyakini mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap stabilitas sosial.
3. Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat
Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung verifikasi lapangan dan pengawasan distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga transparansi program. Keterlibatan ini juga memperkuat rasa kepemilikan kolektif terhadap kebijakan sosial, sehingga mendukung terciptanya ketertiban sosial yang berkelanjutan.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Program Umum dalam Perspektif Legalistik

Pelaksanaan program umum di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Batam menunjukkan keterkaitan erat antara pelayanan publik berbasis legalitas formal dan upaya menjaga ketertiban sosial. Program ini dirancang untuk memastikan implementasi regulasi sosial berjalan sesuai asas legalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Berikut hasil pelaksanaan program umum yang berkontribusi terhadap ketertiban sosial:

Monitoring Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Kegiatan monitoring lapangan ke panti rehabilitasi korban kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip keadilan sosial dan perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Kegiatan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 mengenai Standar Teknis Pelayanan Dasar Bidang Sosial. Pendekatan pemulihan psikososial, layanan konseling, dan penyediaan kebutuhan dasar bagi anak dan perempuan korban kekerasan mencerminkan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana negara bertanggung jawab secara langsung terhadap perlindungan kelompok rentan.

Penerapan SIMAPANKESOS untuk Legalitas dan Transparansi

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Kesejahteraan Sosial (SIMAPANKESOS) memperkuat asas legalitas dalam penyaluran bantuan sosial. Sistem ini

diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengembangan *e-Government*. Penggunaan SIMAPANKESOS memungkinkan pencatatan data penerima bantuan secara resmi dan terdokumentasi dengan baik, sekaligus menjadi alat pengawasan untuk mencegah penyimpangan distribusi bansos. Penelitian Supit dan Lumingkewas menegaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola bansos meningkatkan akurasi data dan akuntabilitas publik.

Digitalisasi Arsip melalui E-Arsip dan SPBE

Pengelolaan arsip secara elektronik melalui E-Arsip mendukung efisiensi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan. Kegiatan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menekankan pentingnya digitalisasi dalam tata kelola dokumen negara. Digitalisasi arsip berkontribusi terhadap ketertiban sosial karena mempercepat birokrasi, mengurangi potensi manipulasi dokumen, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.

Penguatan Sistem Administrasi Pemerintahan Berbasis Legalitas

Selain itu, pemanfaatan sistem nasional seperti SIMPEG (untuk legalitas pengelolaan ASN), SRIKANDI (untuk keabsahan arsip dan surat menyurat), dan SIPD (untuk integrasi perencanaan dan penganggaran daerah) memperlihatkan upaya nyata pemerintah daerah dalam menjaga integritas pelayanan publik. Integrasi berbagai aplikasi tersebut selaras dengan konsep *good governance* yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama.

Kontribusi terhadap Ketertiban Sosial

Secara keseluruhan, pelaksanaan program umum ini memperlihatkan bagaimana sistem sosial dan administratif yang berbasis regulasi formal dapat membentuk ketertiban sosial. Kepatuhan terhadap regulasi, transparansi administrasi, dan penggunaan teknologi digital memperkuat kehadiran negara secara nyata dalam kehidupan masyarakat serta meminimalkan potensi konflik sosial.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Program Khusus dalam Perspektif Legalistik

Pelaksanaan program khusus di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Batam berfokus pada kegiatan yang mendukung stabilitas sosial melalui pendekatan legalistik. Program-program ini menunjukkan peran strategis Dinsos PM sebagai aktor penting dalam menjaga kesejahteraan dan ketertiban sosial di masyarakat perkotaan.

Pemberdayaan Masyarakat melalui Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG)

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG), yang berlandaskan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat, khususnya pemuda dan pelajar, dalam memanfaatkan inovasi teknologi yang legal dan berdaya guna.

Pemberdayaan melalui TTG berkontribusi pada terciptanya ketertiban sosial dengan memperluas akses pengetahuan teknologi di masyarakat. Penelitian Yusuf dan Zanudin menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui inovasi teknologi memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dan mengurangi potensi konflik sosial akibat kesenjangan akses teknologi. Dengan demikian, kegiatan TTG berfungsi sebagai instrumen penguatan solidaritas sosial yang inklusif dan produktif.

Program Bantuan Sosial Lansia sebagai Instrumen Ketertiban Sosial

Program Bantuan Sosial (Bansos) Lansia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial. Dalam pelaksanaannya, Dinsos PM menerapkan sistem distribusi berbasis data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan ketepatan sasaran.

Selain berfungsi sebagai upaya perlindungan sosial, program ini juga berkontribusi pada stabilitas sosial melalui penguatan kohesi antar generasi. Melibatkan lansia secara langsung dalam program bantuan memperkuat nilai gotong royong, meningkatkan solidaritas sosial, dan mengurangi kecemburuan sosial.

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memastikan bahwa bantuan disalurkan secara langsung kepada penerima tanpa potensi penyelewengan. Supit dan Lumingkewas menekankan bahwa distribusi bantuan berbasis data yang transparan terbukti efektif dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pendekatan Legalistik sebagai Jaminan Ketertiban Sosial

Seluruh kegiatan dalam program khusus ini memperlihatkan penerapan prinsip legalistik yang tegas dan terstruktur. Dinsos PM tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai agen pengendalian sosial (*social control agent*) dalam menjaga keteraturan di tengah kompleksitas demografi perkotaan seperti Batam. Peran strategis ini sejalan dengan konsep *good governance* yang menempatkan pemerintah daerah sebagai fasilitator kesejahteraan sosial sekaligus penjamin stabilitas sosial.

4. KESIMPULAN

Program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam terbukti berkontribusi dalam menciptakan tertib sosial di tengah kompleksitas dinamika perkotaan. Peran tersebut tercermin melalui keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat rentan, menekan potensi konflik sosial, memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta membangun solidaritas sosial yang mendukung stabilitas masyarakat. Bantuan sosial juga berfungsi sebagai pendekatan preventif dalam mengurangi risiko gangguan tertib dengan mengatasi akar permasalahan sosial, seperti kemiskinan ekstrem dan pengangguran.

Meskipun demikian, efektivitas program masih menghadapi tantangan, terutama terkait validitas data penerima bantuan, kelengkapan administrasi, dan ketepatan pengelolaan anggaran. Hambatan tersebut menunjukkan pentingnya perbaikan sistem pendataan, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program. Integrasi bantuan sosial dengan kebijakan pembangunan sosial daerah telah selaras dengan visi Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan kesejahteraan lansia dan kelompok rentan lainnya, sehingga diharapkan ke depan program ini tidak hanya berfungsi secara karitatif tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat stabilitas sosial secara berkelanjutan.

5. REFERENSI

- Ali, F., Prasetyo, H., & Ramadhan, A. (2022). Analisis efektivitas bantuan sosial tunai di masa pandemi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 101–115.
- Anwar, A. K., Mudan, I., & Batubara, B. M. (2024). Peranan Dinas Sosial menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): studi di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah*

Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP), 3(2), 68–75.

- Chantiqa, D., Sugiharti, A., & Astuti, R. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak kriminalitas dan PDRB: pendekatan SEM-PLS. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 19(1), 22–35.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. Sage Publications.
- Dewantoro, B. (2024). Faktor sosial ekonomi sebagai prediktor perilaku kriminal. *Jurnal Intelektiva*, 8(3), 44–53.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4 ed.)*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhanifa, S., & Ansori, D. (2024). Efektivitas bantuan sosial dalam mengatasi kemiskinan: studi peran bansos tunai. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(1), 1–12.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2022). *Kriminologi (Cetakan ke-20)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Supit, B. F., & Lumingkewas, E. (2023). Implementasi kebijakan bantuan sosial tunai di daerah perkotaan. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 6(1), 1–22.
- Tanggu Holo, M., & Supardal. (2023). Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyaluran bantuan sosial terdampak COVID-19. *TheJournalish: Social and Government*, 4(3), 274–301.
- Yusuf, H., & Zanudin, S. (2025). Pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap tingkat kriminalitas di kota metropolitan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(2), 2505–2512.